

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

34. Penandaan Penggunaan Penerimaan Dana Bagi Hasil-Sawit (DBH-Sawit) Kabupaten-Kota

A RINCIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DBH SAWIT

A.1 RINCIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAN PEMELUHAARAAN INFRASTRUKTUR JALAN

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN KEMENDAGRI NO. 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024							
						KABUPATEN/KOTA							
1	2	3	4	5	6	7							
1	Penanganan jalan	1 Kegiatan Utama											
		a. rekonstruksi/peningkatan struktur;	Panjang Jalan yang dilakukan rekonstruksi/peningkatan jalan	Km	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan		
							1	03	10	2.01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	
		b. pemeliharaan berkala;	Panjang jalan yang dilakukan Pemeliharaan berkala	Km	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan		
		c. pemeliharaan rutin;	Panjang jalan yang dilakukan Pemeliharaan rutin	Km	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan		
		2 Kegiatan Penunjang											
		a. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual; dan/atau	Jumlah kegiatan konsultan pengawas kegiatan	Paket	Pemerintah Daerah	1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		
		b. perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	jumlah perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan	Frekuensi	Pemerintah Daerah								
		2	Penanganan jembatan	1 Kegiatan Utama									
				a. pemeliharaan berkala jembatan;	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan berkala	Meter	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	2.01	0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan
b. penggantian jembatan; dan/atau	Panjang jembatan yang dilakukanPenggantian			Meter	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan		
c. pembangunan jembatan.	Panjang Jembatan yang dibangun			Meter	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan		
2 Kegiatan Penunjang													
a. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual; dan/atau	Jumlah kegiatan konsultan pengawas kegiatan			Paket	Pemerintah Daerah	1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		
b. perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	jumlah perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan			Frekuensi	Pemerintah Daerah								

A.2 RINCIAN KEGIATAN LAINNYA PENGGUNAAN DBH SAWIT

1	Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat	1 Kegiatan utama									
		a. Sosialisasi Kegiatan di tingkat pekebun	Pertemuan	Frekuensi	Masyarakat	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian
		b. Peningkatan kapasitas tim pendataan	Bimbingan teknis	Orang	Pemerintah Daerah	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
		c. Pendataan pekebun	Sensus	Orang	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
		d. Verifikasi dan validasi data pekebun	Pertemuan	Frekuensi	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian
		e. Pemeriksaan lapangan dan pemetaan	Survey	Persil	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
		f. Penerbitan STDB	Penerbitan surat	Dokumen	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
		2 Kegiatan penunjang									
		a. Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi, bimbingan teknis, pendataan, dan verifikasi	Perjalanan	Frekuensi	Pemerintah Daerah	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian
		b. Fasilitasi Honor narasumber dalam rangka bimbingan teknis	Honor	Laporan	Narasumber	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
		c. Fasilitasi Honor narasumber dalam rangka verifikasi dan validasi data	Honor	laporan	Narasumber	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
		d. Penyediaan sarana prasarana pendukung untuk pemetaan dan pengolahan data	Sewa alat	Unit	Pemerintah Daerah						
		1) GPS Hand Held	Sewa alat	Unit	Pemerintah Daerah						
		2) Laptop dilengkapi aplikasi pemetaan (arcgis)	Sewa alat	Unit	Pemerintah Daerah						
		3) Kendaraan untuk survey lapangan	Sewa alat	Unit	Pemerintah Daerah						
		4) ATK	Belanja bahan	Paket	Pemerintah Daerah						
		5) Printer	Sewa alat	unit	Pemerintah Daerah						
		6) Ruang pertemuan	Sewa alat	unit	Pemerintah Daerah						
		2	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan	1 Kegiatan utama							
a. Pembentukan tim penyusun	Pertemuan			Frekuensi	Pemerintah Daerah	3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Kawasan Pertanian
b. Identifikasi dan pendataan program dan kegiatan	Pertemuan			Frekuensi	Pemerintah Daerah	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya
c. Perumusan rencana aksi	Pertemuan			Frekuensi	Pemerintah Daerah	3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Kawasan Pertanian
d. Konsultasi/Uji publik	Pertemuan			Frekuensi	Pemerintah Daerah	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian
e. Penetapan rencana aksi	Pertemuan			Frekuensi	Pemerintah Daerah	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan pemanfaatan Kawasan pertanian
2 Kegiatan penunjang											
a. Perjalanan dinas dalam rangka pembentukan tim, identifikasi dan pendataan program, perumusan rencana aksi, konsultasi publik, dan penetapan rencana aksi	Perjalanan dinas			Frekuensi	Pemerintah Daerah	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya
b. Fasilitasi Honor narasumber dalam rangka konsultasi/uji publik	Honor			Laporan	Narasumber	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan pemanfaatan Kawasan pertanian
c. Penyediaan sarana pengolahan data program kegiatan	Sewa alat			Unit	Pemerintah Daerah	3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan dan Pengembangan Prasarana, Sarafna dan Kawasan Pertanian
1) Laptop	Sewa alat			Unit	Pemerintah Daerah	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian
2) Printer	Sewa alat	Unit	Pemerintah Daerah								

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN KEMENDAGRI NO. 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024								
						KABUPATEN/KOTA								
1	2	3	4	5	6	7								
3	Pembinaan dan Pendampingan Untuk Sertifikasi Internal Control System (ISPO) Pekebun	1 Kegiatan utama												
		a. Pendataan pekebun untuk proses sertifikasi ISPO	Survey	Data pekebun	a. Pekebun b. Perusahaan c. Pemerintah Daerah	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			
		b. Sosialisasi sertifikasi ISPO	Sosialisasi	Orang	Pekebun	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian			
		c. Pelatihan sertifikasi ISPO	Pelatihan	Orang	Pekebun	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			
		d. Pendampingan Pekebun untuk Sertifikasi ISPO	Bimbingan teknis	Frekuensi	Pekebun	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			
						3	27	03	2.01	0003	Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya			
		1) Pembentukan tim kendali internal	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah									
		2) Penyusunan prosedur/mechanisme terkait pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah									
		3) Sosialisasi prosedur/mechanisme kepada anggota kelembagaan	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah									
		4) Pengelolaan catatan terkait aktivitas pekebun dalam rangka pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO termasuk pengelolaan catatan kelompok tani/koperasi	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah									
		5) Penyusunan dokumen pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO pekebun	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah									
		6) Pelatihan Teknik audit kepada tim kendali internal	Pelatihan	Orang	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah									
		7) Penjadwalan kegiatan audit internal dan pelaksanaan audit internal	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah									
		8) Perbaikan temuan atau ketidaksesuaian pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah									
		9) Penjadwalan audit eksternal	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah									
		2 Kegiatan penunjang												
		a. Fasilitasi Honor narasumber dalam rangka pelatihan sertifikasi ISPO	Honor	laporan	Laporan	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya			
		b. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pekebun	Perjalanan dinas	Frekuensi	Pelaksana	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			
		c. Penyediaan sarana pendukung pengolah data sertifikasi ISPO	Sewa alat	Unit	Pemerintah Daerah	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian			
		1) Kendaraan operasional lapangan	Sewa alat	Unit	Pelaksana									
		2) Laptop	Sewa alat	Unit	Pelaksana									
		3) Printer	Sewa alat	Unit	Pelaksana									
		4) Infocus	Sewa alat	Unit	Pelaksana									
		5) ATK	Sewa alat	Unit	Pelaksana									
		6) Ruang pertemuan	Sewa alat	Unit	Pelaksana									
		4 Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	1 Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi)											
		a	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RtRnL)	Dokumen Perencanaan	Unit	Pemerintah								
b	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat										
c	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat										
d	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat										
e	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	Pemerintah										
f	Rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat										
g	Pembangunan gully plug	Bangunan Gully plug	Unit	Pemerintah dan Masyarakat										
h	Pembangunan Dam Penahan	Bangunan Dam Penahan	Unit	Pemerintah dan Masyarakat										
i	Pembangunan Sumur resapan	Bangunan Sumur Resapan	Unit	Pemerintah dan Masyarakat										
j	Pemeliharaan tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat										
2 Perbenihan Tanaman Hutan (Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi)														
a	Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha	Unit Usaha	Pemerintah dan Masyarakat										
b	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih	Sertifikat	Pemerintah dan Masyarakat										
c	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih	Sertifikat	Pemerintah dan Masyarakat										
d	Sertifikasi Mutu Bibit	Bibit tanaman	Sertifikat	Pemerintah dan Masyarakat										
e	Pengawasan Peredaran Benih Dan/Atau Bibit	Data (Asal usul, jenis Mutu) Benih atau Bibit	Laporan	Pemerintah dan Masyarakat										
f	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat										
g	Pengelolaan Sumber Benih	Luas Sumber Benih	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat										
h	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	Kegiatan pembinaa	Kali	Pemerintah dan Masyarakat										
i	Pembuatan Dan Pengadaan Bibit Untuk Rehabilitasi Lahan	Bibit tanaman	Batang	Pemerintah dan Masyarakat										
3 Pemulihan Lingkungan (Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota)														
a	Kegiatan Penghijauan Lingkungan	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
b	Pembangunan Hutan Kota	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
c	Perlindungan Mata Air, Kanan Kiri Sungai, Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
d	Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (Dam Penahan, Gully Plug, Instalasi Pemamanan Air Hujan, Sumur Resapan Air, Lubang Biopori)	Bangunan Dam Penahan, Gully Plug, Instalasi Pemamanan Air Hujan, Sumur Resapan Air, Lubang Biopori	Unit	Pemerintah dan Masyarakat	1	03	02	2.01	0111	Pembangunan Bendungan				
					1	03	02	2.01	0104	Pembangunan Check Dam				
					1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				
					1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN KEMENDAGRI NO. 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024					
						KABUPATEN/KOTA					
1	2	3	4	5	6	7					
5	Perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			Orang	Masyarakat	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
						1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat